

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis kinerja pendapatan daerah Kabupaten Belu :

- 1) Berdasarkan hasil analisis varians pendapatan daerah tahun anggaran 2019-2022 Kabupaten Belu dapat dikategorikan kurang baik. Dilihat dari tahun 2019-2022 hasilnya selisih kurang dari jumlah yang dianggarkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Kabupaten Belu belum mampu merealisasikan anggaran pendapatan.
- 2) Berdasarkan hasil analisis Pertumbuhan Pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Belu tahun anggaran 2019-2022 mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan secara negatif menunjukkan adanya penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah Kabupaten Belu.
- 3) Berdasarkan hasil analisis rasio Derajat Desentralisasi daerah Kabupaten Belu dari tahun 2019-2022 terus mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan derajat desentralisasi daerah Kabupaten Belu memiliki rata-rata sebesar 8.66% ini berarti derajat desentralisasi dinilai tidak baik.

- 4) Berdasarkan hasil analisis Efektivitas PAD secara keseluruhan rata-rata dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Belu kurang efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena nilai rasio efektivitas kurang dari 100% sebesar 84.31%.
2. Berdasarkan hasil analisis kinerja belanja daerah Kabupaten Belu :
- 1) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Belu dilihat dari Varians Belanja Daerah selama tahun 2019-2022 secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja. Rata-rata Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Belu sebesar 91.90%.
  - 2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Belu dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019-2022 mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang negatif sebesar 0.057%.
  - 3) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Belu dilihat dari Keserasian Belanja Daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal. Selama tahun 2019-2022 rata-rata belanja operasi sebesar 83.53% sedangkan untuk Belanja Modal sebesar 15.93%.

- 4) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Belu dilihat dari Efisiensi Belanja Daerah, realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Belu tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Belu telah melakukan efisiensi belanja.

## **5.2 IMPLIKASI TEORITIS**

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah di mana, satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran.

### 5.3 IMPLIKASI TERAPAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi pemerintah Kabupaten Belu :
  - a) Pemerintah Kabupaten Belu perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan efisiensi untuk beberapa pos yang berhubungan dengan PAD Kabupaten Belu. Efisiensi akan meningkat jika Pemerintah Kabupaten Belu dapat melaksanakan secara lebih optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah yang masih memiliki kontribusi kecil dalam PAD. Ada juga dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pemerolehan PAD oleh yang bersangkutan.
  - b) Angka ketergantungan yang masih tinggi juga merupakan masalah dalam Pemerintahan Kabupaten Belu, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Belu perlu menggali lebih lagi guna mencari beberapa potensi dari masyarakat maupun alam untuk meningkatkan PAD dan sebagai tambahan sumber dana untuk Pemerintah Kabupaten Belu.
  - c) Untuk kinerja belanja sebaiknya Pemerintah Kabupaten Belu dapat meningkatkan realisasi belanja pada belanja modal, dan tetap menginvestasikan belanja pada belanja operasi.

2) Bagi peneliti selanjutnya :

- a) Diharapkan untuk dapat meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dan menambah rasio-rasio keuangan lainnya.
- b) Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian, karena penelitian ini terbatas pada satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara yaitu Kabupaten Belu